

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**DOBO, 14 NOPEMBER 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN ARU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4592);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**  
dan  
**BUPATI KEPULAUAN ARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan dari yang telah ditetapkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

|                                                 |    |                       |                            |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                            |    |                       |                            |
| a. Semula                                       | Rp | 453.706.433.614       |                            |
| b. Bertambah/(Berkurang)                        | Rp | <u>12.383.959.643</u> |                            |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan             |    |                       | Rp 466.090.393.257         |
| 2. Belanja Daerah                               |    |                       |                            |
| a. Semula                                       | Rp | 455.200.547.496       |                            |
| b. Bertambah/(Berkurang)                        | Rp | <u>34.939.674.741</u> |                            |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                |    |                       | Rp 490.140.222.237         |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan             |    |                       | <u>Rp (24.049.828.980)</u> |
| 3. Pembiayaan                                   |    |                       |                            |
| a. Penerimaan                                   |    |                       |                            |
| 1). Semula                                      | Rp | 15.383.236.920        |                            |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                       | Rp | <u>12.441.376.534</u> |                            |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan  |    |                       | Rp 27.824.613.454          |
| b. Pengeluaran                                  |    |                       |                            |
| 1). Semula                                      | Rp | 1.000.000.000         |                            |
| 2). Bertambah/(Berkurang)                       | Rp | <u>-</u>              |                            |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan |    |                       | <u>Rp 1.000.000.000</u>    |

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>                         | Rp 26.824.613.454       |
| <i>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</i> | <u>Rp 2.774.784.474</u> |

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|    |                                                                      |    |                 |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah                                               |    |                 |                    |
|    | 1). Semula                                                           | Rp | 10.640.150.000  |                    |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | (1.640.000.000) |                    |
|    | <u>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</u>               |    |                 | Rp 9.000.150.000   |
| b. | Dana Perimbangan                                                     |    |                 |                    |
|    | 1). Semula                                                           | Rp | 435.566.283.614 |                    |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 497.196.643     |                    |
|    | <u>Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan</u>                     |    |                 | Rp 436.063.480.257 |
| c. | Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah                                 |    |                 |                    |
|    | 1). Semula                                                           | Rp | 7.500.000.000   |                    |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                            | Rp | 13.526.763.000  |                    |
|    | <u>Jumlah Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan</u> |    |                 | Rp 21.026.763.000  |

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri Jenis Pendapatan :

|    |                                                   |    |               |                  |
|----|---------------------------------------------------|----|---------------|------------------|
| a. | Pajak Daerah                                      |    |               |                  |
|    | 1). Semula                                        | Rp | 1.235.000.000 |                  |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                         | Rp | (140.000.000) |                  |
|    | <u>Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan</u>      |    |               | Rp 1.095.000.000 |
| b. | Retribusi Daerah                                  |    |               |                  |
|    | 1). Semula                                        | Rp | 4.155.150.000 |                  |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                         | Rp | -             |                  |
|    | <u>Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan</u>  |    |               | Rp 4.155.150.000 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |    |               |                  |
|    | 1). Semula                                        | Rp | 250.000.000   |                  |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                         | Rp | -             |                  |

|     |                                                                                                                 |    |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
|     | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan                                      | Rp | 250.000.000     |
| d.  | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah                                                                            |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                                      | Rp | 5.000.000.000   |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                                       | Rp | (1.500.000.000) |
|     | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan                                                   | Rp | 3.500.000.000   |
| (3) | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :                     |    |                 |
| a.  | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                                                    |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                                      | Rp | 32.522.168.614  |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                                       | Rp | 497.196.643     |
|     | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan                                           | Rp | 33.019.365.257  |
| b.  | Dana Alokasi Umum                                                                                               |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                                      | Rp | 356.469.535.000 |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                                       | Rp | -               |
|     | Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan                                                                      | Rp | 356.469.535.000 |
| c.  | Dana Alokasi Khusus                                                                                             |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                                      | Rp | 46.574.580.000  |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                                       | Rp | -               |
|     | Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan                                                                    | Rp | 46.574.580.000  |
| (4) | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |    |                 |
| a.  | Pendapatan Hibah                                                                                                |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                                      | Rp | -               |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                                       | Rp | -               |
|     | Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan                                                                       | Rp | -               |
| b.  | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya                                               |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                                      | Rp | 7.500.000.000   |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                                       | Rp | -               |

|    |                                                                                            |    |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|    | Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | Rp | 7.500.000.000  |
| c. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                        |    |                |
|    | 1). Semula                                                                                 | Rp | -              |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                  | Rp | 12.193.563.000 |
|    | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan                               | Rp | 12.193.563.000 |
| d. | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                              |    |                |
|    | 1). Semula                                                                                 | Rp | -              |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                  | Rp | 1.333.200.000  |
|    | Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan                               | Rp | 1.333.200.000  |

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|     |                                                                                               |    |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| a.  | Belanja Tidak Langsung                                                                        |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                    | Rp | 196.402.503.347 |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                     | Rp | 17.132.077.294  |
|     | Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan                                               | Rp | 213.534.580.641 |
| b.  | Belanja Langsung                                                                              |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                    | Rp | 258.798.044.148 |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                     | Rp | 17.807.597.447  |
|     | Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan                                                     | Rp | 276.605.641.595 |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: |    |                 |
| a.  | Belanja pegawai                                                                               |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                    | Rp | 165.072.059.961 |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                     | Rp | 17.144.663.612  |
|     | Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan                                                      | Rp | 182.216.723.572 |
| b.  | Belanja subsidi                                                                               |    |                 |
|     | 1). Semula                                                                                    | Rp | -               |
|     | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                     | Rp | -               |

|    |                                                                                                        |                                          |                |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                                        | Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan | Rp             | -                 |
| c. | Belanja hibah                                                                                          |                                          |                |                   |
|    | 1). Semula                                                                                             | Rp                                       | 6.178.115.000  |                   |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                              | Rp                                       | 400.000.000    |                   |
|    |                                                                                                        |                                          |                |                   |
|    | Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan                                                                 |                                          |                | Rp 6.578.115.000  |
| d. | Belanja bantuan sosial                                                                                 |                                          |                |                   |
|    | 1). Semula                                                                                             | Rp                                       | 2.034.150.000  |                   |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                              | Rp                                       | -              |                   |
|    |                                                                                                        |                                          |                |                   |
|    | Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan                                                        |                                          |                | Rp 2.034.150.000  |
| e. | Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah                                       |                                          |                |                   |
|    | 1). Semula                                                                                             | Rp                                       | -              |                   |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                              | Rp                                       | -              |                   |
|    |                                                                                                        |                                          |                |                   |
|    | Jumlah Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah setelah Perubahan              |                                          |                | Rp -              |
| f. | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                          |                                          |                |                   |
|    | 1). Semula                                                                                             | Rp                                       | 18.118.178.387 |                   |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                              | Rp                                       | 28.413.682     |                   |
|    |                                                                                                        |                                          |                |                   |
|    | Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan |                                          |                | Rp 18.146.592.069 |
| g. | Belanja tidak terduga                                                                                  |                                          |                |                   |
|    | 1). Semula                                                                                             | Rp                                       | 5.000.000.000  |                   |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                                                                              | Rp                                       | (441.000.000)  |                   |
|    |                                                                                                        |                                          |                |                   |
|    | Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan                                                         |                                          |                | Rp 4.559.000.000  |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis belanja :

|    |                 |    |                |
|----|-----------------|----|----------------|
| a. | Belanja Pegawai |    |                |
|    | 1). Semula      | Rp | 25.314.591.800 |

|     |                         |    |                 |                                                  |                    |
|-----|-------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 2). | Bertambah/(Berkurang)   | Rp | 1.298.868.200   |                                                  |                    |
|     |                         |    |                 | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan         | Rp 26.613.460.000  |
| b.  | Belanja Barang dan Jasa |    |                 |                                                  |                    |
| 1). | Semula                  | Rp | 124.967.417.222 |                                                  |                    |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)   | Rp | 14.768.631.634  |                                                  |                    |
|     |                         |    |                 | Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp 139.736.048.856 |
| c.  | Belanja Modal           |    |                 |                                                  |                    |
| 1). | Semula                  | Rp | 108.516.035.126 |                                                  |                    |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)   | Rp | 1.740.097.613   |                                                  |                    |
|     |                         |    |                 | Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan           | Rp 110.256.132.739 |

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|     |                       |    |                |                                                 |                   |
|-----|-----------------------|----|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| a.  | Penerimaan            |    |                |                                                 |                   |
| 1). | Semula                | Rp | 15.383.236.920 |                                                 |                   |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp | 12.441.376.534 |                                                 |                   |
|     |                       |    |                | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan  | Rp 27.824.613.454 |
| b.  | Pengeluaran           |    |                |                                                 |                   |
| 1). | Semula                | Rp | 1.000.000.000  |                                                 |                   |
| 2). | Bertambah/(Berkurang) | Rp | -              |                                                 |                   |
|     |                       |    |                | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 1.000.000.000  |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

|     |                                                                   |    |                |                                                                                            |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a.  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) |    |                |                                                                                            |                   |
| 1). | Semula                                                            | Rp | 15.383.236.920 |                                                                                            |                   |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                             | Rp | 12.441.376.534 |                                                                                            |                   |
|     |                                                                   |    |                | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan | Rp 27.824.613.454 |
| b.  | Pencairan dana cadangan                                           |    |                |                                                                                            |                   |
| 1). | Semula                                                            | Rp | -              |                                                                                            |                   |

|     |                                                                                       |    |               |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan                                      |    |               | Rp               |
| c.  | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan                                       |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | -             |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan              |    |               | Rp               |
| d.  | Penerimaan pinjaman daerah                                                            |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | -             |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan                                   |    |               | Rp               |
| e.  | Penerimaan kembali pemberian pinjaman                                                 |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | -             |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan                        |    |               | Rp               |
| f.  | Penerimaan piutang daerah                                                             |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | -             |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan                                    |    |               | Rp               |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: |    |               |                  |
| a.  | pembentukan dana cadangan                                                             |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | -             |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan                                    |    |               | Rp               |
| b.  | penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah                                        |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | 1.000.000.000 |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |
|     | Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan               |    |               | Rp 1.000.000.000 |
| c.  | pembayaran pokok utang                                                                |    |               |                  |
| 1). | Semula                                                                                | Rp | -             |                  |
| 2). | Bertambah/(Berkurang)                                                                 | Rp | -             |                  |

|    |                                                        |       |    |
|----|--------------------------------------------------------|-------|----|
|    |                                                        | Rp    | -  |
|    | Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan        |       |    |
| d. | pemberian pinjaman daerah                              |       |    |
|    | 1). Semula                                             | Rp    | -  |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                              | Rp    | -  |
|    |                                                        | <hr/> |    |
|    | Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan     |       | Rp |
| e. | pembayaran Utang Pihak Ketiga                          |       |    |
|    | 1). Semula                                             | Rp    | -  |
|    | 2). Bertambah/(Berkurang)                              | Rp    | -  |
|    |                                                        | <hr/> |    |
|    | Jumlah pembayaran Utang Pihak Ketiga setelah Perubahan |       | Rp |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

**Pasal 7**

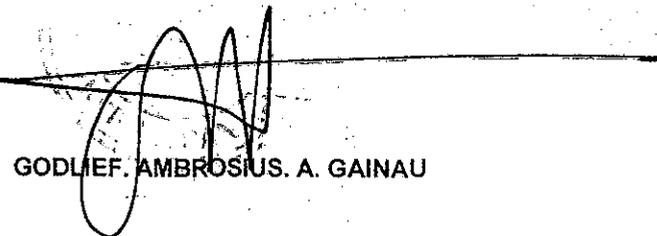
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 14 November 2012



Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 14 November 2012

**SEKERTARIS DAERAH KEPULAUAN ARU**



**GODLIEF. AMBROSIOUS. A. GAINAU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2012 NOMOR 5**